



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

○○○ 2023

Gorontalo, 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat bimbingan dan petunjuk-Nya, maka kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo Tahun 2023.

Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo tahun 2023 yang mencakup hasil-hasil yang telah dicapai, analisis capaian, tujuan dan sasaran strategis, serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap hal-hal yang telah dilaksanakan sesuai dengan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam Laporan ini kami berusaha untuk memberikan penjelasan terhadap target dan capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.

Laporan ini telah disusun dengan optimal, namun masih terdapat kekurangan baik dari aspek substansi maupun redaksional. Olehnya saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran secara sistematis serta mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 yang dapat menjadi referensi terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

Gorontalo, Februari 2024
Kepala Dinas,

DANIAL IBRAHIM
NIP. 19731102 200212 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo tahun 2023 ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai, analisis capaian, tujuan dan sasaran strategis, serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Secara singkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

- 1. *Meningkatnya Nilai Investasi***, Capaian Realisasi Indikator Kinerja "Nilai Realisasi Investasi" pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5,515 Triliun capaian ini jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 yaitu sebesar Rp.2,6 Triliun telah melebihi target, atau capaian nilai realisasi investasi tahun 2023 adalah sebesar 212,1%. Capaian tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai capaian realisasi investasi tahun 2022. Capaian nilai realisasi investasi tahun 2023 naik sebesar 50,06%. nilai realisasi investasi dari tahun 2021 ke 2022 meningkat sebesar 17,24%, nilai realisasi investasi tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat sebesar 50,06%. Persentase capaian nilai realisasi investasi tahun 2023 terhadap target akhir tahun renstra adalah sebesar 172,34%. Efisiensi pada sasaran meningkatnya nilai investasi ini adalah 2,59%.
- 2. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP***, Capaian Realisasi Indikator Kinerja "Nilai SAKIP DPMPTSP" pada tahun ini adalah sebesar 81,01 capaian ini jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 81 telah melebihi target, atau capaian nilai sakip tahun ini adalah sebesar 100,01%. Capaian tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2022. Capaian nilai SAKIP tahun 2023 naik sebesar 100,93%. nilai SAKIP dari tahun 2021 ke 2022 meningkat sebesar 3,73%, nilai SAKIP tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat sebesar 0,93%. Capaian realisasi indikator kinerja "Nilai SAKIP DPMPTSP" pada awal periode renstra ini adalah sebesar Rp. 81,01 jika dibandingkan dengan terget akhir renstra capaian ini adalah sebesar 98,19%. capaian ini jika dibandingkan dengan standar nasional termasuk pada Predikat nilai A. Besaran nilai efisiensi pada sasaran ini adalah 10,56%.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Capaian Realisasi Indikator Kinerja “Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik” pada tahun ini mendapat predikat A dengan kategori pelayanan prima, capaian nilai kinerja pelayanan publik adalah 4,53 capaian ini jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 4,53 telah mencaipai target, atau capaian nilai sikip tahun ini adalah sebesar 100%. Capaian nilai Kinerja Pelayanan Publik tahun 2023 naik sebesar 0,22%. Nilai Pelayanan Publik dari tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat sebesar 5,97%, nilai Pelayanan Publik tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat sebesar 0,22%. Capaian realisasi indikator kinerja “ Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik” pada awal periode renstra ini adalah sebesar Rp. 4,53 jika dibandingkan dengan terget akhir renstra capaian ini adalah sebesar 98,69%. Capaian ini jika dibandingkan dengan standar nasional termasuk pada Predikat nilai A (Pelayanan Prima). Besaran nilai efisiensi pada sasaran ini adalah 0,07%.

Berdasarkan Uraian diatas dapat dilihat bahwa semua indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dicapai pada tahun 2023, bahkan melebihi target yang direncanakan, namun tetap perlu melakukan upaya peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan dalam perbaikan kinerja ditahun yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
1. 1. STRUKTUR ORGANISASI	I-1
1. 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	I-2
1. 3. ISU-ISU STRATEGIS	I-6
1. 4. SUMBER DAYA MANUSIA	I-6
1. 5. SARANA DAN PRASARANA	I-8
1. 6. KONDISI KEUANGAN	I-10
1. 7. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA	I-11
II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO.....	II-1
2.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO.....	II-3
2.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	II-4
2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	II-5

2.5.	RENCANA KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023	II-6
2.6.	PERJANJIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023	II-7
2.7.	ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023	II-8
2.8.	ALOKASI ANGGARAN PERSASARAN STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023	II-9
2.9.	INSTRUMEN PENDUKUNG	II-10
III. AKUNTABILITAS KINERJA		
3.1.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	III-1
3.2.	PERBANDINGAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI	III-3
3.3.	PERBANDINGAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PMPTSP	III-9
3.4.	PERBANDINGAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	III-16
3.5.	REALISASI ANGGARAN	III-21
IV. PENUTUP		
3.6.	KESIMPULAN	IV-1
3.7.	LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN KEDEPAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA	IV-4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP menurut komposisi Bidang	I-7
Tabel 1.1	Jumlah Aparatur Dinas menurut Jabatan	I-7
Tabel 1.3.	Data Aset Dinas Penanaman Modal dan PTSP	I-8
Tabel 1.4.	Alokasi Anggaran DPMPTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023	I-10
Tabel 2.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prvinsi Gorontalo Tahun 2023-2026	II-5
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama Dinas PMPTSP Provinsi Gorontalo	II-6
Tabel 2.3.	Rencana Kerja Tahunan 2023 Dinas PMPTSP Provinsi Gorontalo	II-6
Tabel 2.4.	Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo tahun 2023	II-8
Tabel 2.5.	Anggaran Persasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo tahun 2023	II-9
Tabel 3.1.	Target dan Realisasi Indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi	III-2
Tabel 3.2.	Target dan Reaisasi Indikator Kinerja Predikat SAKIP	III-8
Tabel 3.3.	Interpretasi Predikat dan Nilai Predikat SAKIP	III-11
Tabel 3.4.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Predikat Unit Pelayanan Publik	III-15
Tabel 3.5.	Kategori dan Makna Evluasi Pelayanan Publik	III-16
Tabel 3.6.	Hasil Survey Terhadap Pelayanan Publik	III-21
Tabel 3.7.	Realisasi Anggaran Setiap Sasaran Strategis	III-21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo.....	I-1
Gambar 2.1.	Grafik Realisasi Investasi Provinsi Gorontalo Tahun 2018 s.d.2022	II-2
Gambar 2.2.	Aplikasi SIIG_NG	II-12
Gambar 2.3.	Website Dinas PMPTSP Provinsi Gorontalo	II-12
Gambar 2.4.	Aplikasi e-Monev	II-13
Gambar 2.5.	Aplikasi siDalev	II-13
Gambar 2.6.	Aplikasi FMis	II-14
Gambar 2.7.	Aplikasi SIPD	II-14
Gambar 2.8.	Aplikasi New Siransija	II-15
Gambar 3.1.	Grafik Peningkatan Realisasi investasi Provinsi Gorontalo	III-3
Gambar 3.2.	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Investasi Tahun 2023	III-3
Gambar 3.3	Grafik Perbandingan Realisasi Investasi Th. 2022 dan Th. 2023	III-4
Gambar 3.4.	Grafik Nilai Realisasi Investasi 3 Tahun terakhir	III-4
Gambar 3.5.	Grafik Capaian Realisasi Investasi Provinsi Gorontalo Terhadap Terhadap Target Nasional	III-5
Gambar 3.6.	Grafik Perbandingan Target Nilai SAKIP dan Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2023	III-9
Gambar 3.7.	Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja SAKIP Tahun 2022 dan Tahun 2023	III-9
Gambar 3.8.	Grafik Nilai SAKIP 3 Tahun terakhir	III-10

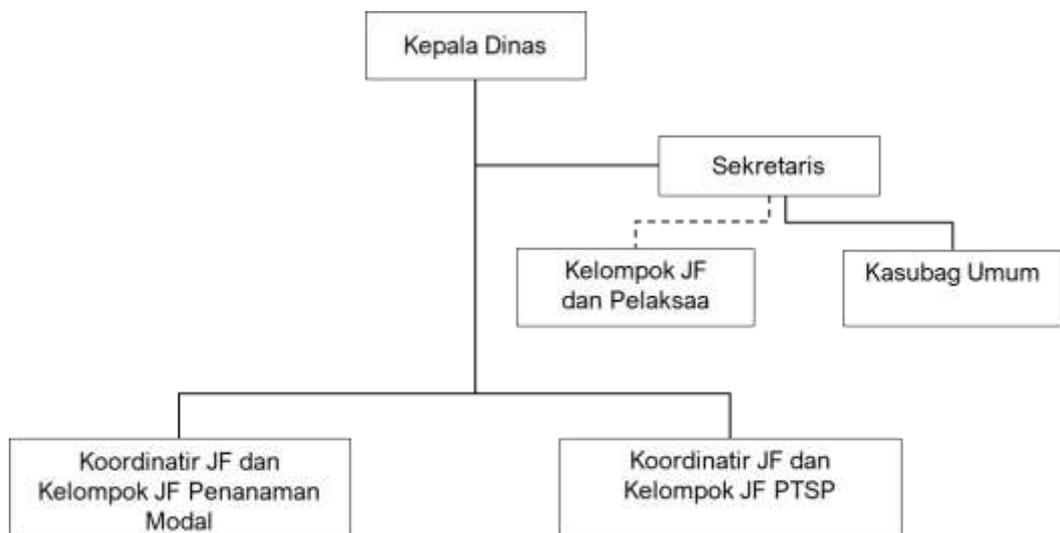
Gambar 3.9. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Pelayanan Publik Tahun 2023	III-17
Gambar 3.10 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2022 dan Tahun 2023	III-17
Gambar 3.11. Grafik Kinerja Unit Pelayanan Publik Beberapa Tahun terakhir	III-18

1. 1. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo memiliki sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo seperti pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo

Berdasarkan dari gambar diatas, Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo terdiri atas Kepala Dinas dibantu oleh 1 (Satu) pejabat Administrator, 1 (Satu) pejabat Pengawas, 2 (dua) Koordinator Jabatan Fungsional dan 8 (delapan) Pejabat Fungsional.

1. 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah. Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, fasilitasi, koordinasi serta penetapan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan PTSP;
- b. menciptakan iklim usaha, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. promosi Penanaman Modal serta Perizinan dan Non Perizinan baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat PMA/PMDN;
- d. pengendalian atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dan PTSP;
- e. pemantauan dan evaluasi Program bidang Penanaman Modal dan PTSP;
- f. pembinaan administrasi kepegawaian, pembiayaan dan perlengkapan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Uraian Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang penanaman modal dan PTSP.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi terkait sesuai tugas masing-masing;
- b. mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada gubernur serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi dinas kepada Gubernur;
- c. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada gubernur mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- d. menyusun program/rencana teknis tahunan menurut bidang tugas;

- e. mengadakan pembinaan dan peningkatan SDM dilingkungan pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- f. melaksanakan Pengendalian atas pelaksanaan Penanaman Modal dan PTSP;
- g. menganalisa dan membuat laporan serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta penyusunan laporan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan rumah tangga;
- c. pengelolaan umum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- f. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Sekretaris dibantu oleh 1 orang pejabat Pengawas (sub bagian) yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta 2 (dua) orang Pejabat Fungsional yaitu Pejabat fungsional Perencana dan fungsional analisis keuangan pusat dan daerah serta staf.

3. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dan Lembaga lainnya secara terpadu untuk kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal, identifikasi kawasan potensi investasi, pemberdayaan usaha dan pengembangan potensi daerah dan melakukan komunikasi yang transparan bagi Dunia Usaha serta mentransformasikan

Sumber Daya Alam Daerah menjadi kekuatan ekonomi dan peluang investasi serta melakukan pengendalian Penanaman Modal

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan Perencanaan Promosi dan kerjasama Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan prospektif untuk dipromosikan;
- b. menyusun profil Penanaman Modal dan bahan promosi lainnya;
- c. melaksanakan koordinasi lintas Sektor dan Dunia Usaha untuk penyelenggaraan promosi secara bersama dan terpadu;
- d. menyelenggarakan kerjasama Penanaman Modal dengan lembaga lain pada tingkat regional, nasional dan internasional;
- e. melakukan promosi penanaman modal yang tepat dan prospektif dalam rangka meningkatkan ekspor dan alih teknologi;
- f. Fasilitasi dan pendampingan penanaman modal dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
- g. melaksanakan analisis dan penyajian data kawasan potensi investasi;
- h. memfasilitasi pengusaha skala besar dan kecil dalam melakukan kemitraan;
- i. menyusun kajian potensi penanaman modal dalam bentuk feasibility study, bussiness plan dan lain-lain;
- j. memberikan pelayanan informasi tata cara Penanaman Modal kepada calon-calon investor;
- k. memberikan pelayanan informasi kebijakan Penanaman Modal;
- l. menyediakan sistem informasi Penanaman Modal bagi investor dan dunia usaha;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bidang Penanaman Modal dibantu oleh 3 orang pejabat fungsional yang terdiri dari:

- a. 3 (Tiga) orang Pejabat fungsional analisis kebijakan

4. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan yang meliputi pendaftaran, pengolahan, penerbitan dan pencabutan perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam melaksanakan operasional kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan verifikasi;
- c. melaksanakan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta verifikasi yang meliputi pendaftaran, pengolahan dan penerbitan perizinan dan non perizinan;
- d. melaksanakan dan pengkoordinasikan penyusunan Tim Teknis;
- e. merumuskan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD terkait atau pihak ketiga dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. melaksanakan verifikasi dan validasi persyaratan, penerbitan perizinan dan non perizinan;
- h. melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan survey atau peninjauan lapangan dengan Tim Teknis;
- j. melakukan pengendalian terhadap Penanaman Modal serta Perizinan dan non perizinan.
- k. melaksanakan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. mengelola administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh 3 pejabat fungsional yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Analis Kebijakan

- b. 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

1. 3. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis dilingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo adalah :

1. Peningkatan Nilai Realisasi Investasi

Peningkatan nilai realisasi penanaman modal menjadi isu yang sangat mendasar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah pandemi covid – 19. Peningkatan realisasi penanaman modal ini akan menimbulkan multiplier efek, peningkatan realisasi penanaman modal juga dapat mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dengan adanya pembukaan usaha baru baik yang dilakukan oleh PMA maupun PMDN. Isu ini sesuai dengan telaahan terhadap RENSTRA Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. isu peningkatan realisasi investasi ini sejalan dengan arah target nasional dalam percepatan pemulihan ekonomi.

2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di bidang penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Percepatan dan peningkatan kualitas layanan perizinan serta peningkatan capaian realisasi investasi perlu juga di dukung dengan tata Kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2021 angka persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan provinsi gorontalo adalah 90.69 %. Peningkatan tata Kelola ini juga dapat dilihat dari peningkatan nilai LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada tahun 2022 nilai LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo adalah 80,26 atau kategori A.

1. 4. SUMBERDAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo didukung oleh Sumber Daya Aparatur. Jumlah aparatur yang terlibat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo seluruhnya berjumlah 45 orang ASN dan 7 orang Honorer. Ditinjau dari sisi jabatan, maka struktur aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP terbagi dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional. Profil aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP menurut komposisi Bidang

No	SUBDIN/BAG	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)		JUML HONORER	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat	8	9	3	1
2	Bidang Penanaman Modal	4	9	1	1
3	Bidang Perizinan	5	8	2	1
Jumlah		16	26	6	3
Jumlah ASN dan Non ASN		42		9	
Jumlah Keseluruhan		51			

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-PTSP Provinsi Gorontalo, 2023

Data Jumlah Aparatur pada dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa jenis kelamin Perempuan sebanyak 63,41 %. Laki-laki sebanyak 36,59 %, dan tenaga Honorer sebanyak 9 orang dengan formasi tenaga honor perempuan sebanyak 33,33% dan tenaga honorer laki-laki sebanyak 66,67 %. Akumulasi perbandingan jumlah total aparatur perempuan dan laki-laki pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan aparatur pada dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo telah memenuhi kesetaraan gender.

Data jumlah Aparatur dinas menurut jabatan, dan data jumlah Aparatur menurut pangkat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Jumlah Aparatur Dinas menurut Jabatan

NO	Jabatan	Laki-laki	Perempuan
1	Pejabat Tinggi Pratama	1	
2	Pejabat Administrator		1
3	Pejabat Pengawas	1	
4	Pejabat Fungsional	2	7
5	Pejabat Pelaksana	12	18
Jumlah		16	26
Total		42	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-PTSP Provinsi Gorontalo, 2023

Data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah aparatur menurut jabatan presentase tertinggi adalah pejabat pelaksana sebanyak 73,17 %, pejabat fungsional sebanyak 19,51 %, pejabat administrator sebanyak 2,44 %, pejabat pengawas dan pejabat tinggi pratama dengan presentase yang sama yaitu sebanyak 2,43 %. Hal ini menunjukkan bahwa piramida oraganisasi dinas sangat ideal dimana pada struktur paling bawah dengan angka tertinggi, ditingkat middle jumlahnya sedang dan ditingkat tertinggi jumlahnya paling kecil.

1. 5. SARANA DAN PRASARAMA

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sampai dengan tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Walaupun belum memiliki prasarana gedung sendiri namun gedung yang telah disediakan cukup memadai dalam pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3. Data Aset Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BARANG
1	Tanah Bangunan Gudang	1	BAIK
2	mesin proses lainnya (dst)	1	BAIK
3	Toyota Kijang Innova / Kijang Innova G	1	BAIK
4	Toyota Avanza / E	1	BAIK
5	Toyota Innova 20QAT / Toyota innova	1	BAIK
6	Toyota / Kijang Mini Bus LGX	1	BAIK
7	Toyota / Kijang Innova E	1	BAIK
8	Sepeda Motor	1	BAIK
9	Sepeda Motor Yamaha Fino	3	BAIK
10	alat ukur universal lainnya (dst)	1	BAIK
11	Scanner Brother	3	BAIK

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BARANG
12	Lemari Besi/Metal	1	BAIK
13	Lemari Kayu	2	BAIK
14	Brandkas	1	BAIK
15	Lemari Katalog	2	BAIK
16	CCTV - Camera Control Television System	1	BAIK
17	Mesin Absensi	1	BAIK
18	LCD Projector/Infocus	4	BAIK
19	Kursi Rapat	150	BAIK
20	A.C. Window	4	BAIK
21	A.C. Split	13	BAIK
22	Televisi	6	BAIK
23	Microphone	8	BAIK
24	Camera film	1	BAIK
25	Tangga Aluminium	2	BAIK
26	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	4	BAIK
27	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	BAIK
28	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	BAIK
29	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	BAIK
30	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	BAIK
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	BAIK
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	BAIK
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16	BAIK
34	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	BAIK
35	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	15	BAIK
36	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	11	BAIK
37	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	BAIK
38	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	BAIK
39	Alat Studio Lainnya Webcam Logitech / Logitech	1	BAIK
40	Telephone (PABX)	1	BAIK
41	Pesawat Telephone	1	BAIK
42	Handy Talky (HT)	2	BAIK

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BARANG
43	Wireless Amplifier	2	BAIK
44	Distiling Apparatus	8	BAIK
45	P.C Unit	5	BAIK
46	Lap Top	16	BAIK
47	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	BAIK
48	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	BAIK
49	Monitor Lenovo all In One / C20- 30	6	BAIK
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	BAIK
51	Server	1	BAIK
52	Modem	2	BAIK
53	Peralatan Jaringan lainnya	1	BAIK
54	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	BAIK

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-PTSP Provinsi Gorontalo, 2023

1. 6. KONDISI KEUANGAN

Faktor lain yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sumber daya anggaran. Sumber Daya Anggaran digunakan sesuai rencana dan prioritas program, menganut proporsi belanja sebagaimana ketentuan APBD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo yang digunakan selang tahun 2023 adalah sebesar

Tabel 1.4. Alokasi Anggaran DPMPSTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU 2023 (Rp)
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	150.000.000
	- Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	150.000.000
	➤ Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	150.000.000
2.	- Program Promosi Penanaman Modal	300.000.000
	- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi	300.000.000
	➤ Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	300.000.000
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	477.701.000

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU 2023 (Rp)
	- Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	477.701.000
	➢ Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	277.701.200
	➢ Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	199.999.800
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	985.801.200
	- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	985.801.200
	➢ Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	588.666.200
	➢ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	397.135.000
5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	146.440.100
	- Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	146.440.100
	➢ Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	146.440.100
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.224.822.140
	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	287.010.700
	➢ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.137.500
	➢ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.873.200
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.925.925.297
	➢ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.879.221.397
	➢ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.703.900
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.396.330
	➢ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	41.396.330
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.006.400
	➢ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	313.006.400
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.483.413
	➢ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	657.483.413
JUMLAH		8.284.764.440

Sumber : Dinas PM-PTSP Provinsi Gorontalo, 2023

1. 7. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, selain itu laporan ini juga telah mengacu pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum Dinas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo bab ini memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Struktur Organisasi
- b) Tugas pokok, fungsi
- c) Isu-isu strategis,
- d) Keadaan Pegawai
- e) Keadanaan Sarana dan Prasarana
- f) Kondisi Keuangan
- g) Sistematika LAKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian Kinerja tahun 2023. Selain itu pada bab ini diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Rencana Strategis
- b) Tujuan dan sasaran perangkat daerah
- c) Strategi dan Arah Kebijakan
- d) Indikator Kinerja Utama
- e) Perjanjian Kinerja tahun 2023
- f) Anggaran Rencana tahun 2023
- g) Alokasi Anggaran Persasaran strategis
- h) Instrumen pendukung

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi uraian mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan dengan beberapa tahun terakhir
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional (jika ada);
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi ringkasan pencapaian kinerja, hambatan dan kendala dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya

BAB
II

• PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo disusun dalam rangka pemenuhan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu untuk membantu Pj. Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi dibidang penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun secara spesifik, terukur secara kuantitatif dan dapat diverifikasi, serta berorientasi pada hasil dengan kerangka waktu yang jelas. Perencanaan strategis bertujuan untuk : 1) meningkatkan kinerja institusi dan pegawai; 2) meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi program serta kegiatan; dan 3) meningkatkan sinkronisasi program peningkatan investasi antar institusi dan antar pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Diharapkan dengan adanya Renstra ini, pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali secara dinamis mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 memuat penetapan tujuan, sasaran, dan strategi yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Hasil evaluasi terhadap isu strategis Urusan Penanaman Modal pada periode Renstra tahun 2017 – 2022, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun terjadi koreksi karena pandemic covid – 19, trend realisasi investasi provinsi Gorontalo tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini.



Gambar 2.1. Grafik Realisasi Investasi Provinsi Gorontalo Tahun 2018 s.d.2022

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 adalah:

- Penyusunan regulasi sektor penanaman modal mengikuti perkembangan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat
- Identifikasi Potensi investasi serta memetakan potensi investasi Provinsi Gorontalo
- Peningkatan Promosi investasi melalui media elektronik dan media social yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu
- Peningkatan kualitas pelayanan dengan tetap menggunakan layanan perizinan berupa OSS RBA, selain itu dibuat juga aplikasi daerah untuk mengakomodir perizinan yang tidak menggunakan OSS RBA
- Melakukan Identifikasi, evaluasi terhadap ketentuan izin yang terbit melalui OSS RBA
- Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan melakukan identifikasi masalah penanaman modal, pengawasan pelaksanaan pelaporan LKPM
- Melakukan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan laporan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Peningkatan Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja urusan penanaman modal.

Rencana Strategis ini dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan realisasi investasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo. Sedangkan dalam Dokumen RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 telah menetapkan:

- a. Tujuan dan sasaran
- b. Strategi dan arah kebijakan
- c. Indikator Kinerja Utama

Hal ini ditetapkan untuk mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Tujuan dan sasaran, Strategi dan arah kebijakan, Indikator Kinerja Utama diuraikan pada sub bab berikut ini.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO

Tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan penjabaran atau implementasi dari RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi target kinerja untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo, tujuan tersebut adalah:

1. Peningkatan Pertumbuhan Investasi
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo merumuskan sasaran dan indikator kinerja berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Pertumbuhan Investasi, dapat dicapai dengan sasaran:
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi dengan indikator kinerja:
 - Nilai realisasi Investasi

2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP, dapat dicapai dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerjanya:
 - Predikat SAKIP Dinas PMPTSP
 - b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan) dengan indikator kinerjanya:
 - Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan)

2.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO

Strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo memuat langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya tujuan, dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo. Rumusan strategi dan arah kebijakan yang berkaitan dengan misi pembangunan urusan penanaman modal jangka menengah daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026.

Strategi yang akan ditempuh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Mendorong investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun kemitraan
2. Meningkatkan realisasi penanaman modal
3. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
4. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal
5. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal,
6. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal,

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prvinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

Tujuan : Peningkatan Pertumbuhan Investasi				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Mendorong investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun kemitraan	1. Penyusunan database dan promosi potensi investasi 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan 3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Tujuan : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan penatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD 2. Meningkatkan Sarana, Prasarana, SDM dan Administrasi Perkantoran 3. Meningkatkan Tata Kelola Data Sektoral
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan)	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan dan pemanfaatan sistim informasi	1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sistim informasi pelayanan perizinan dan non perizinan

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO

Indikator Kinerja penyelenggara urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023 - 2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Peningkatan Nilai realisasi Investasi	Nilai Realisasi PMA/PMDN yang diambil dari data <i>Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)</i>
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP	Predikat SAKIP Dinas PMPTSP	
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan)	Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan)	

2.5. RENCANA KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Gorontalo

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai realisasi Investasi	2,6 Triliun
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP	Predikat SAKIP Dinas PMPTSP	A
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan)	Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan)	A

2.6. PERJANJIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023

Perjanjian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang menjadi pemicu dalam pencapaian target dan realisasi apa yang telah direncanakan dalam organisasi. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur dan Pimpinan SKPD atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Gubernur dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi Gubernur untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Pj. Gubernur Gorontalo dan Kepala Dinas dapat dilihat dalam lampiran pada akhir laporan kinerja ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.

2.7. ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023

Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah sebagai berikut ini:

Tabel 2.4

Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo tahun 2023

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU 2023 (Rp)
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	150.000.000
	- Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	150.000.000
	➤ Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	150.000.000
2.	- Program Promosi Penanaman Modal	300.000.000
	- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi	300.000.000
	➤ Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	300.000.000
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	477.701.000
	- Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	477.701.000
	➤ Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	277.701.200
	➤ Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	199.999.800
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	985.801.200
	- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	985.801.200
	➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	588.666.200
	➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	397.135.000
5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	146.440.100
	- Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	146.440.100

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU 2023 (Rp)
	➤ Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	146.440.100
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.224.822.140
	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	287.010.700
	➤ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.137.500
	➤ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.873.200
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.925.925.297
	➤ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.879.221.397
	➤ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.703.900
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.396.330
	➤ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	41.396.330
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.006.400
	➤ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	313.006.400
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.483.413
	➤ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	657.483.413
	JUMLAH	8.284.764.440

2.8. ALOKASI ANGGARAN PERSASARAN STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023

Alokasi anggaran persasaran stragis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah seabgai berikut ini:

Tabel 2.5
 Anggaran Persasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU 2023 (Rp)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi		1.435.801.200
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	150.000.000
		- Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	150.000.000
		➤ Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	150.000.000
		- Program Promosi Penanaman Modal	300.000.000
		- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi	300.000.000
		➤ Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	300.000.000

NO	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU 2023 (Rp)
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	985.801.200
		- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	985.801.200
		➢ Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	588.666.200
		➢ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	397.135.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan)		624.141.100
		Program Pelayanan Penanaman Modal	477.701.000
		- Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	477.701.000
		➢ Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	277.701.200
		➢ Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	199.999.800
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	146.440.100
		- Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	146.440.100
		➢ Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	146.440.100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP		6.224.822.140
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.224.822.140
		- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	287.010.700
		➢ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.137.500
		➢ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.873.200
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.925.925.297
		➢ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.879.221.397
		➢ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.703.900
		- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.396.330
		➢ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	41.396.330

NO	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU 2023 (Rp)
		- Aministrasi Umum Perangkat Daerah	313.006.400
		➢ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	313.006.400
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.483.413
		➢ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	657.483.413
		JUMLAH	8.284.764.440

2.9. INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo Tahun 2023, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi, baik di bangun oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo untuk di gunakan semua OPD maupun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sendiri.

Dalam konteks pengembangan informasi Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Instansi Pemerintah dilingkungan Provinsi Gorontalo. Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Beberapa aplikasi pendukung yang telah dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pemerintah Provinsi Gorontalo untuk digunakan adalah sebagai berikut:

2.9.1. Sistim Informasi Investasi Gorontalo_ New Generation (SIIG_NG)

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang menyediakan informasi potensi investasi, Komoditas investasi, serta peluang investasi yang tersebar di wilayah Provinsi Gorontalo secara berkala. Aplikasi dibangun sebagai salah satu media promosi investasi Provinsi Gorontalo, dimana system ini dapat memudahkan pelaku usaha jika berminat dengan komoditas serta potensi investasi yang ada di Provinsi Gorontalo. Melalui aplikasi ini pelaku usaha juga dapat memperoleh

informasi terkait dengan komoditas dan peluang investasi di Provinsi Gorontalo. Aplikasi ini dapat diakses oleh semua masyarakat.



Gambar 2.2. Aplikasi SIIG_NG

2.9.2. Website Dinas MPTSP

Website Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat diakses melalui <https://dpmptsp.gorontaloprov.go.id/> pada website ini memuat kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP setiap saat, serta informasi lainnya.

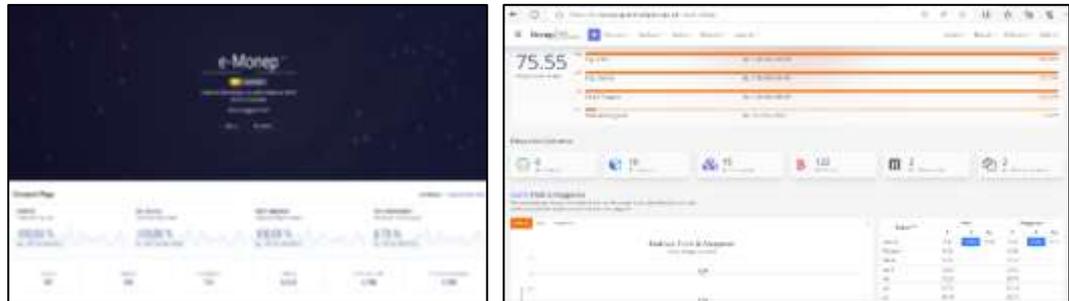


Gambar 2.3 Website Dinas PMPTSP Provinsi Gorontalo

2.9.3. Elektronik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (e-Monev)

Sistem Informasi e-Monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan baik realisasi keuangan maupun realisasi Fisik pelaksanaan Program Kegiatan setiap OPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan oleh kepala Daerah. Selain itu aplikasi ini juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai dilingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo.



Gambar 2.4 Aplikasi e-Monev

2.9.4. Aplikasi siDalev

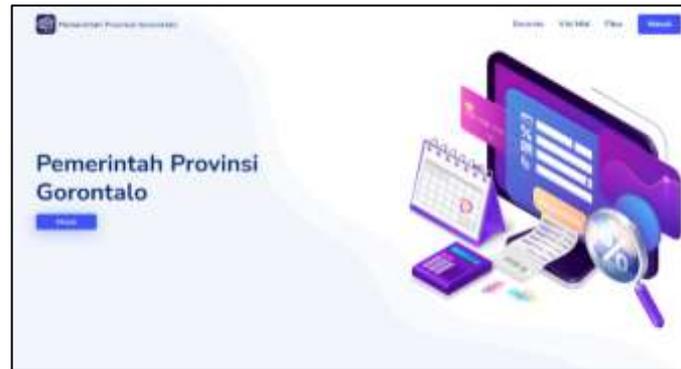
Aplikasi siDalev merupakan aplikasi yang digunakan untuk evaluasi terhadap rencana kerja secara berkala pada semua dinas yang ada dilingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Evaluasi yang dimuat dalam aplikasi ini adalah evaluasi terhadap output Program, Kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja Program, Kegiatan, Subkegiatan.



Gambar 2.5 Aplikasi siDalev

2.9.5. Aplikasi FMIS

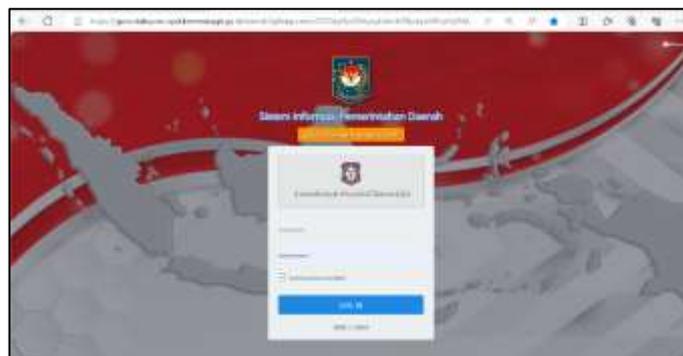
Aplikasi Merupakan sistem penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah Provinsi Gorontalo. Melalui aplikasi ini proses penyelenggaraan keuangan di provinsi Gorontalo dapat di pantau secara berkala. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari sistem informasi SIMDA Keuangan yang telah ada sebelumnya. Sistem ini memudahkan OPD dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan penatausahaan keuangan.



Gambar 2.6 Aplikasi Fmis

2.9.6. Aplikasi SIPD

SIPD merupakan aplikasi sistem informasi perintah daerah yang dibangun oleh kementerian dalam negeri untuk melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan penganggaran dan pelaksanaan penatausahaan keuangan pada satu sistem. Sistem ini wajib digunakan oleh semua pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kab/kota. Melalui aplikasi ini proses perencanaan dan penganggaran sudah dalam satu sistem tidak lagi terpisah-pisah. Aplikasi ini digunakan mulai dari tahapan penyusunan RENSTRA, RENJA sampai proses penatausahaan keuangan.



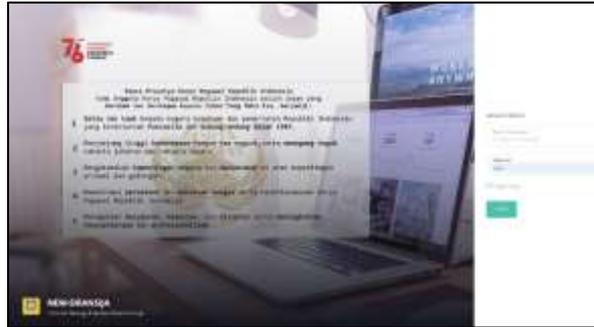
Gambar 2.7 Aplikasi SIPD

2.9.7. Aplikasi New Siransija

Aplikasi ini merupakan sistem yang dibast untuk menilai kinerja setiap ASN di Provinsi Gorontalo. Beberapa kinerja ASN yang dinilai dalam aplikasi ini adalah:

- Kehadiran (Disiplin) pegawai
- Pelaporan Pajak
- Itegritas

- Etos Kerja
- Gotong Royong
- Sasaran kinerja pegawai tahunan, bulanan, hingga aktifitas harian
- Penilaian perilaku kerja bawahan oleh atasan masing-masing



Gambar 2.8 Aplikasi New Siransija

BAB
III

• AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo melaksanakan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang disusun sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo diukur dengan membandingkan pencapaian indikator kinerja dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DPM-PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023. Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2023 adalah Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 DPM-PTSP Provinsi Gorontalo setelah reviu oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo.

Pada tahun 2023, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (Tiga) Sasaran Strategis dengan menggunakan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.



Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi

Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) sebanyak 1(satu) Indikator Kinerja, dan Indikator Kinerja tersebut dapat diukur secara utuh karena tersedianya data yang cukup.

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1 (satu) "Peningkatan Realisasi Investasi" Uraian target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja pada Sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi

Indikator Kinerja	Target Th 2023	Realisasi Th 2023	Capaian Th 2023	Target Akhir Renstra	Realisasi Capaian Renstra sd. 2023
Nilai Realisasi Investasi	2,6 Triliun	5,515 Triliun	212,1 % 	3,2 Triliun RTS	5,515 atau 172,34%

Ket: ✓ = mencapai target,  = melampaui target, ✗ = tidak mencapai target

Dekripsi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Pemerintah akan memastikan bahwa berbagai kemudahan dan penyederhanaan prosedur bagi kegiatan investasi yang sudah dikeluarkan Pemerintah, baik melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri/Lembaga terkait, berjalan dengan baik yang dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Kemudahan berusaha yang di kembangkan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan perizinan yang bermuara pada peningkatan realisasi investasi telah dilakukan dengan penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission Risk Base Approach* (OSS RBA). Sampai dengan tahun 2023 sistem ini telah terintegrasi dengan kementerian lembaga teknis terkait baik pusat dan daerah. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya. Pemerintah provinsi Gorontalo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah Menyusun Perda Nomor 6 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Perda ini

merupakan penjabaran beberapa peraturan pemerintah yaitu: PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, PP No. 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha DI daerah, PP No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta PP No. 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan peningkatan realisasi investasi provinsi Gorontalo. Peningkatan realisasi investasi di Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini.



Gambar 3.1. Grafik Peningkatan Realisasi investasi Provinsi Gorontalo

3.2. PERBANDINGAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Realisasi Indikator Kinerja “Nilai Realisasi Investasi” pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5,515 Triliun capaian ini jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 yaitu sebesar Rp.2,6 Triliun telah melebihi target, atau capaian nilai realisasi investasi tahun 2023 adalah **sebesar 212,1%**.



Gambar 3.2. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Investasi Tahun 2023

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Capaian Realisasi Indikator Kinerja “Nilai Realisasi Investasi” pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.2,589 Triliun sedangkan capaian nilai realisasi investasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5,515 Triliun. Capaian tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai capaian realisasi investasi tahun 2022. Capaian nilai realisasi investasi tahun 2023 **naik sebesar 50,06%**.



Gambar 3.3. Grafik Perbandingan Realisasi Investasi Th. 2022 dan Th. 2023

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian Realisasi Indikator Kinerja “Nilai Realisasi Investasi” pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5,515 Triliun, capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi investasi beberapa tahun terakhir. Nilai realisasi investasi beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.4. Grafik Nilai Realisasi Investasi 3 Tahun terakhir

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai realisasi investasi dari tahun 2021 ke 2022 **meningkat sebesar 17,24%**, nilai realisasi investasi tahun 2022 ke tahun 2023 **meningkat sebesar 50,06%**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Tahun 2023 merupakan awal tahun renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo, dimana periode renstra ini adalah 2023 – 2026. Capaian realisasi indikator kinerja “Nilai Realisasi Investasi” pada awal periode renstra ini adalah sebesar Rp. 5,515 Triliun jika dibandingkan dengan target akhir renstra capaian ini sudah melampaui target, dimana target akhir renstra adalah sebesar Rp.3,2 Triliun. Persentase capaian nilai realisasi investasi tahun 2023 terhadap target akhir tahun renstra adalah **sebesar 172,34%**.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Nasional

Target realisasi investasi Nasional adalah sebesar Rp.1.400 Triliun, target ini didistribusi kesemua provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Gorontalo. Nilai realisasi investasi yang ditargetkan oleh Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp.5,48 Triliun. Capaian nilai realisasi investasi Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah sebesar Rp.5,515 Triliun, dengan demikian capaian ini jika dibandingkan dengan target nilai realisasi investasi Provinsi Gorontalo telah melampaui target, capaian nilai realisasi investasi Provinsi Gorontalo terhadap target nasional adalah **sebesar 100,64%**.



Gambar 3.5. Grafik Capaian Realisasi Investasi Provinsi Gorontalo Terhadap Terhadap Target Nasional

f. Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja yang telah dilakukan

Capaian realisasi indikator kinerja "Nilai Realisasi Investasi" Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023 berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2023. Beberapa hal menyebabkan capaian ini melampaui target adalah:

- 1) Tersedianya data potensi investasi Provinsi Gorontalo
- 2) Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha yang dilakukan mulai dari pemenuhan persyaratan izin pada aplikasi OSS.
- 3) Pelaksanaan mobile service pelayanan perizinan kepada calon pelaku usaha
- 4) Terlaksananya bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam penyampaian laporan kegiatan penanaman modal secara berkala
- 5) Terlaksananya pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan izin dan pelaporan LKPM yang telah dilakukan dengan melibatkan tim teknis.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Nilai Investas", diperlukan realisasi anggaran sebesar Rp 1.398.622.051,- dari anggaran penunjang sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp 1.435.801.200,- Kinerja sasaran strategis telah melebihi target diatas 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 97,41% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini sudah efisien, besaran nilai efisiensi pada sasaran ini adalah 2,59% . SDM yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis sejumlah 19 orang. Namun dengan keterbatasan SDM, sasaran strategis tersebut dapat dicapai dengan maksimal hanya oleh 13 personil. Hal ini mengindikasikan bahwa dari segi SDM sudah efisien.

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program kegiatan peninjang tercapainya indikator kinerja sasaran "Meningkatnya Nilai Investas" serta output setiap sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
Output kegiatan adalah tersusunnya 1 (satu) dokumen buku Peta Potensi Investasi Provinsi Gorontalo 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi daerah-

daerah potensi investasi di Provinsi Gorontalo terhadap komoditas unggulan daerah khususnya bidang pertanian berdasarkan data hasil survey di kabupaten/kota dengan basis kecamatan.

Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

Output sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Gorontalo tahun 2023. Capaian output ini adalah 100%.

2) Program Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah Jumlah Kegiatan promosi yang dilaksanakan. Kegiatan promosi yang dilaksanakan adalah berupa bisnis matching yang dilaksanakan 1 kali dan video Promosi Investasi. Capaian dari kegiatan ini adalah 100%.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Output dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi yaitu berupa video promosi penanaman modal dan aplikasi SIIG_NG, aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk promosi potensi investasi Provinsi Gorontalo capaian dari sub kegiatan ini adalah 100%.

3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Output kegiatan adalah Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pembinaan dan pengawasan penanaman modal. Jumlah kegiatan usaha yang dibina dan diawasi tahun 2023 adalah sejumlah 351 kegiatan usaha dari target 160 kegiatan usaha

1. *Sub kegiatan* : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Output dari Sub Kegiatan adalah : Jumlah kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal sebanyak 300 pelaku usaha

2. *Sub kegiatan* : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Output dari Sub Kegiatan adalah: Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sebanyak 51 kali



Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP

Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran ini adalah sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja tersebut dapat diukur secara utuh karena tersedianya data yang cukup.

Pencapaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP” diukur menggunakan 1 (satu) Indikator Kinerja. Uraian target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja pada Sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Target dan Reaisasi Indikator Kinerja Predikat SAKIP

Indikator Kinerja	Target Th 2023	Realisasi Th 2023	Capaian Th 2023	Target Akhir Renstra	Realisasi Capaian Renstra sd. 2023
Predikat SAKIP Dinas PMPTSP	A	A	100 % ✓	A	A atau 100%

Ket: ✓ = mencapai target, ✨ = melampaui target, ✗ = tidak mencapai target

Dekripsi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sstsem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Jika akuntabilitas keuangan hasilnya berupa laporan keuangan, maka produk akhir dari SAKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan, baik yang dibiayai oleh APBD, APBN atau pun DAK.

3.3. PERBANDINGAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PMPTSP

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Realisasi Indikator Kinerja "Nilai SAKIP DPMPTSP" pada tahun ini adalah sebesar 81,01 capaian ini jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 81 telah melebihi target, atau capaian nilai sakip tahun ini adalah **sebesar 100,01%**.



Gambar 3.6. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2023

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Capaian Realisasi Indikator Kinerja "Nilai SAKIP DPMPTSP" pada tahun 2022 adalah sebesar 80,26 sedangkan capaian nilai SAKIP pada tahun 2023 adalah sebesar 81,01. Capaian tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2022. Capaian nilai SAKIP tahun 2023 **naik sebesar 100,93%**.



Gambar 3.7. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja SAKIP Th. 2022 dan Th. 2023

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian Realisasi Indikator Kinerja " Nilai SAKIP DPMPTSP" pada tahun 2023 adalah sebesar 81,01, capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja nilai SAKIP beberapa tahun terakhir. Nilai realisasi kinerja beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.8. Grafik Nilai SAKIP 3 Tahun terakhir

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai SAKIP dari tahun 2021 ke 2022 **meningkat sebesar 3,73%**, nilai SAKIP tahun 2022 ke tahun 2023 **meningkat sebesar 0,93%**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Tahun 2023 merupakan awal tahun renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo, dimana periode renstra ini adalah 2023 – 2026. Capaian realisasi indikator kinerja "Nilai SAKIP DPMPTSP" pada awal periode renstra ini adalah sebesar Rp. 81,01 jika dibandingkan dengan target akhir renstra capaian ini adalah **sebesar 98,19%**, dimana target akhir renstra adalah sebesar 82,5.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional

Capaian Nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah sebesar 81,01 capaian ini jika dibandingkan dengan standar nasional termasuk pada **Predikat nilai A** dimana Dinas PMPTSP dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon

4/Pengawas/Subkoordinator. Standar nasional terkait dengan capaian SAKIP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Interpretasi Predikat dan Nilai Predikat SAKIP

NO	PREDIKAT	NILAI	INTERPRETASI
1.	AA	>90 – 100	SANGAT MEMUASKAN Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	>80 – 90	MEMUASKAN Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3.	BB	>70 – 80	SANGAT BAIK Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
4.	B	>60 – 70	BAIK Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit

			perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	>50 – 60	CUKUP MEMADAI Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
6.	C	>40 – 50	KURANG Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat
7.	D	0 – 30	SANGAT KURANG Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

f. Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja yang telah dilakukan

Capaian realisasi indikator kinerja "Nilai SAKIP" Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2023. Beberapa hal menyebabkan capaian ini sesuai target adalah karena indikator kinerja yang ditetapkan telah dipahami dan mapu dilaksanakan oleh seluruh pejabat pengampu kegiatan baik di sekretariat maupun bagian teknis. Selain itu proses perencanaan penganggaran pada Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Gorontalo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Telah dilaksanakan evaluasi secara berkala mulai dari level pimpinan hingga pelaksana teknis kegiatan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan evaluasi ini juga dijadikan acuan dalam pemberian reward

dan panishmen untuk seluruh pegawai pada dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP", dengan indikator Nilai SAKIP DPMPTSP diperlukan realisasi anggaran sebesar Rp 5.567.339.006,- dari anggaran penunjang sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP tahun 2023 sebesar Rp 6.224.822.140,- Kinerja sasaran strategis telah melebihi 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 89,44% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini sudah efisien, besaran nilai efisiensi pada sasaran ini adalah 10,56%. SDM yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis sejumlah 22 orang. Namun dengan keterbatasan SDM, sasaran strategis tersebut dapat dicapai dengan maksimal hanya oleh 18 personil. Hal ini mengindikasikan bahwa dari segi SDM sudah efisien.

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program kegiatan penunjang tercapainya indikator kinerja sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP" serta output setiap sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output sub kegiatan :

- 3 Dokumen Perencanaan
- 1 Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output sub kegiatan :

5 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
3. Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ)
4. Laporan Evaluasi Kinerja triwulan
5. Laporan Hasil Evaluasi Renja

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Output kegiatan adalah 1 dokumen laporan keuangan yang sesuai dengan SAP dan 100% tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Output kegiatan adalah Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana 100%

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output kegiatan adalah 10 sarana prasarana yang tersedia dan 100% tingkat kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output kegiatan adalah 6 jasa kantor yang tersedia tepat waktu.



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran ini adalah sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja tersebut dapat diukur secara utuh karena tersedianya data yang cukup.

Pencapaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” diukur menggunakan 1 (satu) Indikator Kinerja. Uraian target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja pada Sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Predikat Unit Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Target Th 2023	Realisasi Th 2023	Capaian Th 2023	Target Akhir Renstra	Realisasi Capaian Renstra sd. 2023
Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik	A	A	100 % ✓	A	A atau 100%

Ket: ✓ = mencapai target, ✨ = melampaui target, ✗ = tidak mencapai target

Dekripsi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator predikat kinerja pelayanan publik unit pelayanan perizinan pada dinas PMPTSP. Beberapa hal yang dievaluasi dalam mengevaluasi kualitas pelayanan publik terdiri dari 6 aspek yaitu:

1. *Aspek Kebijakan Pelayanan Publik*, dimana hal-hal yang dinilai adalah standar pelayanan, maklumat pelayanan, survey kepuasan masyarakat,
2. *Aspek Profesionalisme SDM pelayanan publik* dimana hal-hal yang dinilai adalah Kompetensi, responsifitas dan kode etik, penghargaan dan sanksi, serta budaya pelayanan
3. *Aspek Sarana Prasarana Pelayanan Publik* dimana hal-hal yang dinilai adalah parkir dan ruang tunggu, sarpras bagi yang berkebutuhan khusus, sarana penunjang lain, sarana front office
4. *Aspek Sistim Informasi Pelayanan Publik* dimana hal-hal yang dinilai adalah sistim informasi elektronik, sistim informasi non elektronik

5. *Aspek Konsultasi dan Pengaduan* dimana hal-hal yang dinilai adalah Tersedianya media dan sarana untuk konsultasi, serta tersedianya media dan sarana pengaduan.
6. *Aspek Inovasi Pelayanan Publik* dimana hal-hal yang dinilai adalah adanya inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB No. 17/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan Menteri ini sebagai acuan teknis pelaksanaan penilaian pada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Permen ini turunan dari UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 38) dan PP No. 96/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 12/2009 tentang Pelayanan Publik. Kategori nilai kinerja pelayanan publik yang terdiri dari:

Tabel 3.5 Kategori dan Makna Evaluasi Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

3.4. PERBANDINGAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Realisasi Indikator Kinerja “ Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik” pada tahun ini mendapat predikat A dengan kategori pelayanan prima, capaian nilai kinerja pelayanan publik adalah 4,53 capaian ini jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 4,53 telah mencapaia target, atau capaian nilai sakisip tahun ini adalah **sebesar 100%**.



Gambar 3.9. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Pelayanan Publik Tahun 2023

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

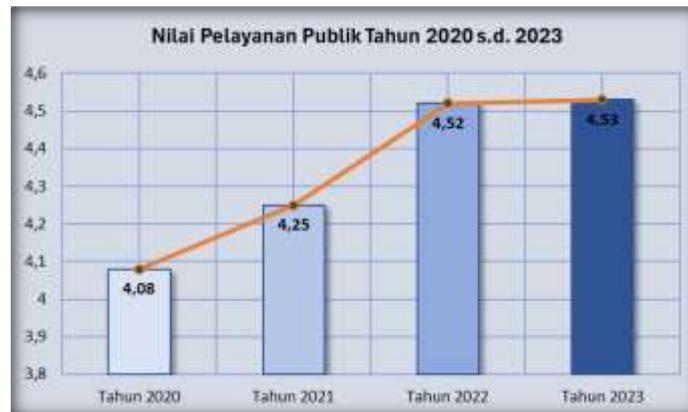
Capaian Realisasi Indikator Kinerja “Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik” pada tahun 2022 adalah sebesar 4,52 sedangkan capaian nilai SAKIP pada tahun 2023 adalah sebesar 4,53. Capaian tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2022. Capaian nilai Kinerja Pelayanan Publik tahun 2023 **naik sebesar 0,22%.**



Gambar 3.10. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2022 dan Tahun 2023

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian Realisasi Indikator Kinerja “Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik” pada tahun 2023 adalah sebesar 4,53, capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja unit pelayanan publik beberapa tahun terakhir. Nilai realisasi kinerja beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.11. Grafik Kinerja Unit Pelayanan Publik Beberapa Tahun terakhir

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai Pelayanan Publik dari tahun 2021 ke tahun 2022 **meningkat sebesar 5,97%**, nilai Pelayanan Publik tahun 2022 ke tahun 2023 **meningkat sebesar 0,22%**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Tahun 2023 merupakan awal tahun renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo, dimana periode renstra ini adalah 2023 – 2026. Capaian realisasi indikator kinerja “ **Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik**” pada awal periode renstra ini adalah sebesar Rp. 4,53 jika dibandingkan dengan terget akhir renstra capaian ini adalah **sebesar 98,69%**, dimana target akhir renstra adalah sebesar 4,59.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional

Capaian **Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah sudah mencapai nilai 4,53 capaian ini jika dibandingkan dengan standar nasional termasuk pada **Predikat nilai A (Pelayanan Prima)**. Standar nasional terkait dengan capaian kinerja unit pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dilihat pada tabel 3.5 diatas.

f. Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja yang telah dilakukan

Capaian realisasi indikator kinerja “**Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik**” Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2023 mencapai target yang di tetapkan dalam rencana kerja tahun 2023. Beberapa hal menyebabkan

capaian ini sesuai target adalah karena indikator kinerja yang ditetapkan telah dipahami dan mapu dilaksanakan oleh seluruh pejabat pengampu kegiatan baik di sekretariat maupun bagian teknis. Selain itu proses perencanaan penganggaran pada Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Gorontalo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Telah dilaksanakan evaluasi secara berkala mulai dari level pimpinan hingga pelaksana teknis kegiatan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan evaluasi ini juga dijadikan acuan dalam pemberian reward dan panishmen untuk seluruh pegawai pada dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik", dengan idnikator "Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik" diperlukan realisasi anggaran sebesar Rp 623.647.608,- dari anggaran penunjang sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik tahun 2023 sebesar Rp 624.141.100,- Kinerja sasaran strategis telah melebihi 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 89,44% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini sudah efisien, besaran nilai efisiensi pada sasaran ini adalah 0,07%. SDM yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis sejumlah 21 orang. Namun dengan keterbatasan SDM, sasaran strategis tersebut dapat dicapai dengan maksimal hanya oleh 15 personil. Hal ini mengindikasikan bahwa dari segi SDM sudah efisien.

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program kegiatan penunjang tercapainya indikator kinerja sasaran "Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik" serta output setiap sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Program

1) Program Pelayanan Penanaman Modal

a) Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Output kegiatan adalah 2.040 Izin dan Non Izin yang telah diterbitkan

✓ *Sub Kegiatan:* Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Output sub kegiatan ini adalah jumlah izin dan non izin yang diterbitkan sejumlah 2.040 yang terdiri atas izin di sektor pertanian, peternakan dan perkebunan sebanyak 22 izin, sektor perikanan dan kelautan sebanyak 371 izin, sektor Perindustrian sebanyak 249 izin, sektor Perdagangan sebanyak 0 izin, sektor Perhubungan sebanyak 11 izin, sektor Kesehatan sebanyak 5 izin, sektor Pendidikan sebanyak 2 izin, sektor Pariwisata sebanyak 24 izin, sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1321 izin, sektor ESDM sebanyak 35 izin, dan sektor PUPR sebanyak 0 izin. Dari target 525 izin dengan realisasi 2.040 izin, terlihat telah melebihi target yang ditetapkan.

- ✓ *Sub Kegiatan* Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Output sub kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang terfasilitasi pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan sejumlah 250 kegiatan usaha

2) **Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

- a) Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
Output kegiatan adalah jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan yaitu data dan informasi yang diolah diuraikan dalam 4 Dokumen yaitu Dokumen survey kepuasan masyarakat; Dokumen indeks persepsi anti korupsi; Dokumen Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan; Dokumen tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat.

- ✓ *Sub Kegiatan*: Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Output sub kegiatan ini adalah Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan yaitu data dan informasi yang diolah diuraikan dalam 4 Dokumen. Dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Hasil Survey Terhadap Pelayanan Publik

NO	Dokumen	Nilai Tahun 2023			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Survey Kepuasan Masyarakat	96,32	96,60	97,69	89,74
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	97,97	97,41	97,92	97,08
3	Indkes Persepsi Kualitas Pelayanan	96,32	96,27	97,20	96,58

3.5. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2023, dari pagu anggaran APBD sebesar Rp. 8.284.764.440,- telah direalisasi sebesar Rp 7.595.248.665,- atau 91,68%. Uraian realisasi anggaran setiap sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.7. Realisasi Anggaran Setiap Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU 2023 (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investas	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	150.000.000	149.773.230	99,85
		- Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	150.000.000	149.773.230	99,85
		➢ Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	150.000.000	149.773.230	99,85
		- Program Promosi Penanaman Modal	300.000.000	299.116.913	99,7
		- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi	300.000.000	299.116.913	99,7
		➢ Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	300.000.000	299.116.913	99,7
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	985.801.200	949.731.908	96,34
		- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	985.801.200	949.731.908	96,34
		➢ Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan	588.666.200	559.897.126	95,11

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU 2023 (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
		Pelaksanaan Penanaman Modal			
		➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	397.135.000	389.834.782	98,16
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pmptsp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.224.822.140	5.567.339.006	89,44
		- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	287.010.700	283.791.360	98,88
		➤ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.137.500	85.712.212	98,36
		➤ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.873.200	198.079.148	99,10
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.925.925.297	4.349.887.091	88,30
		➤ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.879.221.397	4.303.460.555	88,20
		➤ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.703.900	46.426.536	99,41
		- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.396.330	35.497.904	85,75
		➤ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	41.396.330	35.497.904	85,75
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.006.400	306.593.150	97,95
		➤ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	313.006.400	306.593.150	97,95
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.483.413	591.569.501	89,97
		➤ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	657.483.413	591.569.501	89,97
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	477.701.000	477.271.532	99,91
		- Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	477.701.000	477.271.532	99,91
		➤ Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis	277.701.200	277.343.530	99,87

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU 2023 (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
		Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
		➤ Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	199.999.800	199.928.002	99,96
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	146.440.100	146.376.076	99,96
		- Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	146.440.100	146.376.076	99,96
		➤ Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	146.440.100	146.376.076	99,96

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2023. LKIP disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Gorontalo Tahun 2023 merupakan Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah urusan penanaman modal periode pertama dari Renstra 2023-2026. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, secara keseluruhan capaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai Investasi

- Capaian Realisasi Indikator Kinerja "Nilai Realisasi Investasi" pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5,515 Triliun capaian ini jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 yaitu sebesar Rp.2,6 Triliun telah melebihi target, atau capaian nilai realisasi investasi tahun 2023 adalah **sebesar 212,1%**.
- Capaian Realisasi Indikator Kinerja "Nilai Realisasi Investasi" pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.2,589 Triliun sedangkan capaian nilai realisasi investasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5,515 Triliun. Capaian tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai capaian realisasi investasi tahun 2022. Capaian nilai realisasi investasi tahun 2023 **naik sebesar 50,06%**. nilai realisasi investasi dari tahun 2021 ke 2022 **meningkat sebesar 17,24%**, nilai realisasi investasi tahun 2022 ke tahun 2023 **meningkat sebesar 50,06%**.

- Capaian realisasi indikator kinerja “Nilai Realisasi Investasi” pada awal periode renstra ini adalah sebesar Rp. 5,515 Triliun jika dibandingkan dengan target akhir renstra capaian ini sudah melampaui target, dimana target akhir renstra adalah sebesar Rp.3,2 Triliun. Persentase capaian nilai realisasi investasi tahun 2023 terhadap target akhir tahun renstra adalah **sebesar 172,34%**.
- Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Nilai Investas”, diperlukan realisasi anggaran sebesar Rp.1.398.622.051,- dari anggaran penunjang sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp 1.435.801.200,- Kinerja sasaran strategis telah melebihi target diatas 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 97,41% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini sudah efisien, besaran nilai efisiensi pada sasaran ini adalah 2,59%

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP

- Capaian Realisasi Indikator Kinerja “Nilai SAKIP DPMPTSP” pada tahun ini adalah sebesar 81,01 capaian ini jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 81 telah melebihi target, atau capaian nilai sakip tahun ini adalah **sebesar 100,01%**.
- Capaian Realisasi Indikator Kinerja “Nilai SAKIP DPMPTSP” pada tahun 2022 adalah sebesar 80,26 sedangkan capaian nilai SAKIP pada tahun 2023 adalah sebesar 81,01. Capaian tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2022. Capaian nilai SAKIP tahun 2023 **naik sebesar 100,93%**. nilai SAKIP dari tahun 2021 ke 2022 **meningkat sebesar 3,73%**, nilai SAKIP tahun 2022 ke tahun 2023 **meningkat sebesar 0,93%**
- Tahun 2023 merupakan awal tahun renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo, dimana periode renstra ini adalah 2023 – 2026. Capaian realisasi indikator kinerja “Nilai SAKIP DPMPTSP” pada awal periode renstra ini adalah sebesar Rp. 81,01 jika dibandingkan dengan target akhir renstra capaian ini adalah **sebesar 98,19%**.
- Capaian Nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah sebesar 81,01 capaian ini jika dibandingkan dengan standar nasional termasuk pada **Predikat nilai A**

- Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP”, dengan indikator Nilai SAKIP DPMPTSP diperlukan realisasi anggaran sebesar Rp 5.567.339.006,- dari anggaran penunjang sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP tahun 2023 sebesar Rp 6.224.822.140,- Kinerja sasaran strategis telah melebihi 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 89,44% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini sudah efisien, besaran nilai efisiensi pada sasaran ini adalah 10,56%.

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

- Capaian Realisasi Indikator Kinerja “ Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik” pada tahun ini mendapat predikat A dengan kategori pelayanan prima, capaian nilai kinerja pelayanan publik adalah 4,53 capaian ini jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 4,53 telah mencapaia target, atau capaian nilai sakip tahun ini adalah sebesar 100%
- Capaian Realisasi Indikator Kinerja “ Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik” pada tahun 2022 adalah sebesar 4,52 sedangkan capaian nilai SAKIP pada tahun 2023 adalah sebesar 4,53. Capaian tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2022. Capaian nilai Kinerja Pelayanan Publik tahun 2023 naik sebesar 0,22%. Nilai Pelayanan Publik dari tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat sebesar 5,97%, nilai Pelayanan Publik tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat sebesar 0,22%
- Tahun 2023 merupakan awal tahun renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo, dimana periode renstra ini adalah 2023 – 2026. Capaian realisasi indikator kinerja “ Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik” pada awal periode renstra ini adalah sebesar Rp. 4,53 jika dibandingkan dengan terget akhir renstra capaian ini adalah sebesar 98,69%.
- Capaian Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah sudah mencapai nilai 4,53 capaian ini jika dibandingkan dengan standar nasional termasuk pada Predikat nilai A (Pelayanan Prima)
- Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, dengan indikator “Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik” diperlukan realisasi anggaran sebesar Rp 623.647.608,- dari anggaran penunjang sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik tahun 2023 sebesar Rp 624.141.100,- Kinerja sasaran strategis telah melebihi 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai

89,44% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini sudah efisien, besaran nilai efisiensi pada sasaran ini adalah 0,07%.

4.2. LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN KEDEPAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dilihat bahwa semua indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dicapai pada tahun 2023, namun tetap perlu melakukan upaya peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Hal-hal yang perlu di lakukan dan diperhatikan untuk perbaikan kinerja instansi kedepannya adalah:

1. Melakukan optimalisasi dalam pemetaan potensi infestasi serta promosi infestasi Provinsi Gorontalo
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan serta evaluasi dan monitoring pemenuhan persyaratan perizinan pada aplikasi OSS
3. Optimalisasi pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan kepada pelaku usaha dalam penyampaian laporan kegiatan pelaksanaan penanaman modal
4. Melakukan evaluasi kesesuaian inidkator kinerja mulai dari RPJMD, RENSTRA, RENJA sampai pada output program kegiatan yang akan dilaksanakan secara berkala
5. Melakukan evaluasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tahunan dan Perjanjian kinerja secara rutin setiap bulan.
6. Memberikan penghargaan kepada pejabat yang memiliki capaian kinerja terbaik setiap 6 bulan sekali berdasarkan hasil evaluasi kinerja tim internal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo dalam mencapai sasaran organisasi, untuk selanjutnya diajukan kepada Gubernur Gorontalo dan pihak lain yang berkepentingan untuk menjadi bahan evaluasi.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini

masih terdapat kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan di masa mendatang sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi dan misi Provinsi Gorontalo senantiasa dapat tercapai.